



Communication and Political Conflict Resolution of the Prosperous Justice Party in Handling the Case of Fahri Hamzah

Komunikasi dan Resolusi Konflik Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Menangani Kasus Fahri Hamzah

Anna Kurniawati

INSTITUTION

Komisi X DPR RI
Gedung Nusantara 1 Lantai 1,
Jl. Gatot Subroto, Senayan
Jakarta 10270

PHONE

(+62) 8211 4280 465

EMAIL

kurniawati.anna@gmail.com

DOI

<https://www.doi.org/10.37010/prop.v1i1.253>

PAPER PAGE

23-34

PROPAGANDA is a Journal of Communication Studies which is published twice a year on January and July. PROPAGANDA is a scientific publication media in the form of conceptual paper and field research related to communication studies. It is hoped that PROPAGANDA can become a media for academics and researchers to publish their scientific work and become a reference source for the development of science and knowledge.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian konflik yang dilakukan oleh PKS dalam menangani kasus Fahri Hamzah. Penelitian ini menggunakan teori pengendalian organisasi. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan studi *literature review*. Berdasarkan teori *organizational control*, PKS menggunakan metode dominasi: kekerasan supresif. Keputusan PKS memberhentikan Fahri Hamzah merupakan metode dominasi atau penindasan. Teori Pengendalian Organisasi adalah teori yang mengatur cara-cara komunikasi yang mampu mengendalikan pegawai. Pengendalian organisasi dilakukan dengan empat cara: *Pertama*, pengendalian sederhana atau penggunaan kekuasaan yang berlangsung dan terbuka. *Kedua*, pengendalian teknis atau penggunaan alat-alat teknologi. *Ketiga*, birokrasi, yaitu penggunaan prosedur organisasi dan aturan formal, seperti yang dijelaskan oleh Weber. Karyawan diberikan buku panduan yang mencakup kebijakan yang harus diikuti, memo, ulasan repost, ulasan rapat, dan ulasan kinerja yang digunakan untuk menyampaikan harapan lain. *Keempat*, kontrol konsertif. Ada beberapa metode yang digunakan dalam resolusi konflik: *Pertama*, metode stimulasi konflik, pengurangan konflik dan resolusi konflik. *Kedua*, metode pengurangan konflik digunakan untuk mereduksi permusuhan yang disebabkan oleh konflik. *Ketiga*, metode penyelesaian konflik, yang dilakukan melalui dominasi atau supresi, kompromi, dan pemecahan masalah yang integral. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan studi studi pustaka. Berdasarkan teori *organizational control*, PKS menggunakan metode *domination* atau *suppressive violence*. Keputusan PKS memberhentikan Fahri Hamzah merupakan metode dominasi atau penindasan.

This study aims to determine the conflict resolution carried out by the Prosperous Justice Party in handling Fahri Hamzah's case. This study uses organizational control theory. This study uses a qualitative methodology with literature review studies. Based on organizational control theory, PKS uses the method of domination:suppressive violence. PKS decision to dismiss Fahri Hamzah is a method of domination or suppression. Organizational Control Theory is a theory that regulates the ways of communication that are able to control employees. Organizational control is carried out in four ways: First, simple control or the uses of power that is on going and open. Second, technical control or use of technology tools. Third, bureaucracy, which is the use of organizational procedures and formal rules, as described by Weber. Employees are provided with a guidebook that include policies to follow, memos, repost reviews, meeting reviews and performance reviews which are used to convey other expectations. Fourth, concertive control. There are several methods used in conflict resolution: First, conflict stimulation methods, conflict reduction and conflict resolution. Second, the conflict reduction method is used to reduce the hostility caused by conflict. Third, conflict resolution methods, which are carried out through domination or suppression, compromise, and integrative problem solving. This study uses a qualitative methodology with a literature review study. Based on organizational control theory, PKS uses the method of domination or suppressive violence. The PKS decision to dismiss Fahri Hamzah is a method of domination or suppression.

KEYWORD

komunikasi, resolusi konflik, politik, teori *organizational control*

communication, conflict resolution, politic, organizational control theory

PROPAGANDA

PENDAHULUAN

Runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, tidak saja membuka peluang kebebasan bagi kehidupan politik bangsa Indonesia, tetapi juga menumbuhkan hasrat para tokoh politik, agamawan, pengusaha, dan kalangan intelektual untuk menggapai kekuasaan melalui partai politik. Antusiasme masyarakat untuk mendirikan partai sangat besar, hal ini ditandai dengan kenyataan munculnya tidak kurang dari 150 partai politik baru hanya dalam kurun waktu enam bulan saja, sejak runtuhnya Orde Baru (Setiawan&Nainggolan, 2004).

Salah satu pembahasan yang menarik tentang demokratisasi di Indonesia adalah eksistensi partai berbasis Islam. Kenaikan perolehan suara partai-partai berbasis Islam di Indonesia pada pemilu 2001 yang secara kolektif meraih 33 persen dibanding 19 persen pada pemilu 2009, menunjukkan bahwa partai Islam mampu meningkatkan kembali kinerja elektoralnya (Herdiansah, 2017)

Lingkar Survei Indonesia (LSI), pada 1 s.d. 8 Oktober 2012, mengadakan penelitian yang menunjukkan bahwa jika pemilu diadakan sekarang, maka semua partai Islam mendapatkan suara kurang dari 5 persen dan jika semua dikumpulkan, maka totalnya tidak lebih dari 21,1 persen. Bahkan tidak ada satu pun partai Islam yang bisa masuk menjadi lima besar pemenang pemilu (Republika, 22 Oktober 2012). Salah satu alasan kekalahan tersebut adalah terdapat lebih dari 46,1 persen responden yang menilai apabila menang dan memimpin, partai Islam akan menerapkan hukum Syariah (Yumitro, 2013).

Keberadaan partai politik Islam pasca reformasi tidak luput dari konflik internal. Perpecahan Partai Amanat Nasional (PAN) yang melahirkan Partai Matahari Bangsa (PMB) dan perpecahan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang melahirkan Partai Bintang Reformasi (PBR) menjadi salah satu fakta adanya konflik internal di tubuh partai (Akmar, 2019).

Sejarah politik di Indonesia memperlihatkan bahwa konflik internal partai sudah terjadi sejak kemerdekaan Republik Indonesia (Akmar, 2019). Pada tahun 1930 konflik terjadi di partai PSII yang pecah menjadi beberapa kelompok yaitu Salim yang diketuai oleh Muhamad Roem dengan kelompok Abikusno Tjokrosurojo (Ketua Lajnah Tanfidziyah), yang dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan terhadap kerja sama koperasi dengan pemerintah Hindia Belanda.

Pada masa reformasi, lahirnya banyak partai tidak bisa dilepaskan dari konflik internal dan dinamika perkembangan partai politik. Di satu sisi konflik internal terjadi sebagai isu yang dianggap lebih dominan umumnya terjadi karena bersumber dari gesekan saat suksesi kepemimpinan di antara elemen, unsur atau aktor utama partai (Paturahman, 2013).

PKS merupakan salah satu partai yang sejak berdiri diterpa permasalahan baik konflik internal maupun eksternal. Pada tahun 2010, muncullah sebuah situs blog bernama *PKS Watch* yang mengkritik kebijakan PKS dan menuai reaksi keras dari simpatisan PKS yang kemudian mendorong terbentuknya blok *PKS Watch*. Situs ini bukan situs resmi PKS, namun situs ini tidak kembali muncul ke publik karena merasa adanya perbedaan pandangan dengan PKS.

Pada bulan September 2008 muncullah FKP (Forum Kader Peduli) yang berpusat di Masjid Al hikmah di mampang Prapatan yaitu tempat di mana PKS pertama kali dideklarasikan. Istilah Faksi Kesejahteraan dan Keadilan mulai muncul pasca Pemilu di tahun 2007 hampir bersamaan dengan lahirnya FKP(Akmar, 2019). Tokoh penting dalam Gerakan ini adalah Yusuf Supendi yang pada waktu itu menjadi Anggota DPR RI. Selain itu, ada juga tokoh bernama Samsul Balda yang merupakan mantan wakil presiden Partai Keadilan . Forum ini berusaha mengkritisi berbagai kebijakan PKS. FKP dibentuk oleh sebagian kalangan dari tokoh-tokoh senior PKS sebagai sebuah protes dan kecewa dengan perkembangan PKS yang sudah berwarna pragmatis di mana banyak generasi awal PKS yang dipecat (Akmar, 2019).



Pada 16 Mei 2009 terbitlah sebuah buku bertajuk ilusi Negara Islam, ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia yang diterbitkan oleh The Wahid Institute. Terbitnya buku ini menuai kontroversi karena melukiskan hubungan antara PKS dan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai kelompok Islam garis keras yang hendak mendirikan Khilafah Ismaliyah.

Penetapan Luthi Hasan Ishaq sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi merupakan ujian berat bagi PKS. Selama ini, PKS membangun citra diri sebagai partai dakwah dengan mengusung jargon bersih, peduli, dan profesional. Bahkan, dalam situsnya sempat ditampilkan foto Luthfi dengan keterangan “bersih dari korupsi bukan prestasi, tetapi kewajiban (Khoiri, 2013). Peristiwa ditetapkannya Presiden PKS sebagai tersangka kasus suap impor daging tersebut tentu saja menjadi isu panas yang sigap ditangkap media. Hampir semua media massa di Indonesia mengangkat kasus tersebut pada *prime time* ataupun *headline news*.

Konflik internal yang terjadi dalam tubuh PKS pada penelitian ini melibatkan Pimpinan partai yaitu Mohammad Sohibul Iman yang saat itu menjabat sebagai Presiden PKS, dengan Fahri Hamzah (FH) yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Fahri Hamzah adalah kader partai dengan perolehan suara terbanyak di daerah pemilihannya di Nusa Tenggara Barat. Fahri Hamzah mendapatkan perolehan suara sah 125.083 dalam pemilu Legislatif 2014 di Dapil NTB dengan posisi pertama perolehan suara terbanyak di PKS dengan nomor urut 1 dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Fahri Hamzah adalah deklarator Partai Keadilan yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disebabkan karena pada pemilu 1999, PK tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2 %. Pada saat itu PK hanya menempati posisi ketujuh dengan 1.436.565 suara (1,36%). Hal ini berdampak pada tindakan *stembus accord* dengan delapan partai politik berbasis Islam lainnya.

Konflik dalam tubuh PKS berawal dari pemecatan Fahri Hamzah (FH) oleh Majelis Tahkim PKS pada tanggal 11 Maret 2016. Dilanjutkan penandatanganan SK pada 1 April 2016 oleh presiden PKS Dr. Sohibul Iman. FH sebelumnya dilaporkan ke Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) PKS terkait kasus dugaan pelanggaran etik. Tidak terima atas keputusan PKS, FH kemudian menggugat PKS ke pengadilan. Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, FH menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp1,6 juta dan imaterial senilai lebih dari Rp500 miliar.

Pihak-pihak yang digugat adalah mantan Presiden PKS Sohibul Iman, mantan Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, mantan Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis dan Abdi Sumaiti. Gugatan FH kemudian dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 November 2016. Pengadilan juga mewajibkan PKS untuk membayar Rp 300 miliar kepada FH.

Tidak terima atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan FH, PKS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun PKS kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung, permohonan PKS ditolak. Perkara tersebut mengantongi Nomor 607 K/PDT.SUS-Parpol/2018. Berkas ini diputus pada 30 Juli.

Kemudian FH melayangkan permohonan sita aset dan daftar objek sita kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan karena sebelumnya, 5 orang pengurus PKS, selaku tergugat dalam kasus melawan Fahri, tak hadir saat dipanggil oleh Juru Sita PN Jakarta Selatan. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan PKA melawan FH terkait ganti rugi Rp30 miliar. Namun pemecatan FH oleh PKS dinyatakan batal demi hukum.

PKS merupakan sebuah organisasi politik yang di dalamnya beranggotakan bermacam-macam individu dengan berbagai karakter dan latar belakang pendidikan. PKS sebagai sebuah organisasi dibangun dengan suatu tujuan tertentu dan terdapat saling ketergantungan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Sebagai sebuah sistem, mesin PKS digerakkan

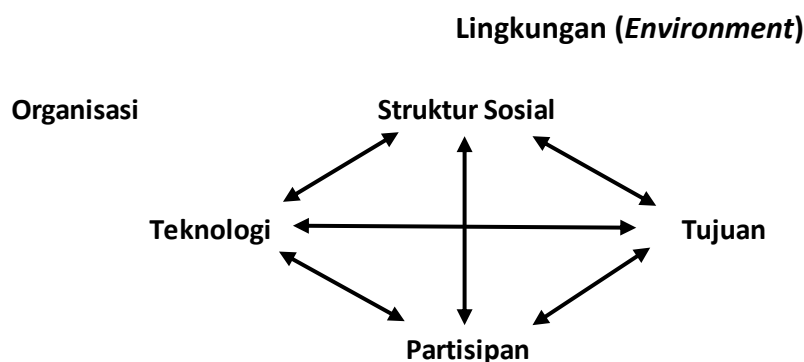
PROPAGANDA

oleh seluruh komponen partai baik Anggota Legislatif, struktur kepengurusan dari level pusat sampai ranting, kader, tokoh dan simpatisan partai.

Schein (1982) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Schein juga mengatakan bahwa organisasi mempunyai karakteristik tertentu yaitu mempunyai struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan bagian lain dan tergantung pada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut. Organisasi memiliki ciri khas adanya ketergantungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Hal ini menandakan bahwa organisasi merupakan sebuah sistem.

Kochler (1976) mengatakan bahwa organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Wright (1977) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu bentuk sistem terbuka dari aktivitas yang dikoordinasi oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Kesimpulan dari ketiga pendapat di atas adalah organisasi merupakan suatu sistem, mengkoordinasi aktivitas dan mencapai tujuan bersama atau tujuan umum. Organisasi disebut sebagai sistem karena terdiri dari berbagai bagian yang saling tergantung satu sama lain. Jika satu bagian mengalami gangguan, maka akan mempengaruhi bagian yang lain. Dalam sebuah partai politik, jika salah satu bagian mengalami gangguan, maka akan mempengaruhi kinerja partai secara keseluruhan (Muhammad, 2015). Organisasi sangat bervariasi, ada yang sangat sederhana hingga ada yang sangat kompleks. Untuk memahami organisasi, model di bawah ini menggambarkan elemen dasar dari organisasi dan saling keterkaitan satu elemen dengan elemen lainnya.



Sumber: Scott (1981)

Gambar 1. Model Elemen Organisasi

Elemen organisasi terdiri dari: struktur sosial, partisipan, tujuan, dan teknologi. Struktur sosial adalah pola atau aspek aturan hubungan yang ada antara partisipan di dalam suatu organisasi. Struktur sosial menurut (Davis Scott, 1981) dapat dipisahkan menjadi dua komponen yaitu struktur normatif dan struktur tingkah laku. Struktur normatif mencakup nilai, norma dan peranan yang diharapkan. Nilai adalah kriteria yang digunakan dalam memilih tujuan tingkah laku, sedangkan norma adalah aturan umum mengenai tingkah laku yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengejar tujuan. Komponen kedua adalah struktur tingkah laku. Komponen ini berfokus kepada tingkah laku yang dilakukan dan bukan pada resep bertingkah laku.

Terkait konflik dalam tubuh PKS, pihak yang terlihat dalam konflik ini adalah Fahri Hamzah dalam hal ini sebagai kader yang di pecat dari PKS dan DPP PKS terdiri dari mantan Presiden PKS M.Sohibul Iman, Majelis Tahkim PKS dan BPDO. Jika dijabarkan ketiga elemen ini terdiri dari Presiden PKS M. Sohibul Iman, mantan Ketua Dewan Syariah Surahman



Hidayat, mantan Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis dan Abdi Sumaiti.

Ada tiga isu utama dalam kasus ini yaitu: dugaan pelanggaran etik, pemecatan Fahri Hamzah dan gugatan Fahri Hamzah. Mengenai dugaan pelanggaran etik ini, disebabkan oleh adanya beberapa pernyataan Fahri Hamzah antara lain:

- a. Menyebut “*rada-rada bloon*” untuk para anggota DPR RI. Pernyataan ini diadukan oleh sebagian anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan dikemudian hari Fahri Hamzah diputus oleh MKD melakukan pelanggaran kode etik ringan.
- b. Fahri Hamzah telah mengatasnamakan DPR RI bahwa DPR RI telah sepakat membubarkan KPK.
- c. Fahri Hamzah pasang badan untuk tujuh proyek DPR di mana hal tersebut bukan arahan pimpinan PKS.
- d. Fahri Hamzah melontarkan pernyataan tentang: menilai masih kurangnya tunjangan gaji pimpinan dan anggota DPR RI padahal fraksi PKS secara resmi menolak kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan para pejabat negara termasuk pimpinan dan anggota DPR RI
- e. Terkait revisi UU KPK di mana Fahri menolak revisi UU KPK.

Mengenai pernyataan FH tersebut, mantan Presiden PKS menyampaikan pendapatnya, bahwa FH sebagai pimpinan DPR RI daripada mengangkat gagasan tujuh proyek DPR RI yang berbiaya mahal, lebih baik melakukan terobosan-terobosan substantif berupa transformasi struktural (di bidang politik, ekonomi, sosial dan bidang lainnya) melalui perbaikan dan pengusulan beragam Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR RI.

Teori Kendali Organisasi merupakan sebuah teori, karya dari Philip Tompkins dan rekan-rekan yang mengatur cara-cara komunikasi yang mampu mengendalikan para pegawai. Kendali dinyatakan dalam organisasi dengan empat cara (Ferrel&Aiken, 1981). *Pertama*, kendali sederhana (*simple control*), atau penggunaan kekuasaan yang berlangsung dan terbuka. *Kedua*, kendali teknis (*technical control*), atau penggunaan alat-alat teknologi. *Ketiga*, birokrasi, yang merupakan penggunaan prosedur organisasi dan aturan-aturan formal, seperti yang digambarkan Weber. Pegawai diberikan sebuah buku panduan yang mencakup kebijakan yang harus diikuti, memo, tinjauan laporan, tinjauan rapat dan tinjauan kinerja yang digunakan untuk menyampaikan harapan yang lain. *Keempat*, kendali konsertif (*concertive control*), yaitu penggunaan hubungan interpersonal dan kerja sama tim sebagai sebuah cara kendali. Hal ini merupakan bentuk kendali yang paling sederhana karena mengandalkan pada realitas dan nilai-nilai bersama. Dalam organisasi konsertif, aturan dan regulasi yang tertulis jelas digantikan oleh pemahaman pemaknaan nilai, objektif, dan cara-cara pencapaian bersama, sejalan dengan apresiasi yang mendalam untuk “misi” organisasi.

Keempat tipe organisasi ini cenderung ditemukan dalam berbagai kombinasi dan ada kecenderungan menjauh dari kendali langsung dan sederhana ke bentuk kendali yang lebih halus, kompleks, dan konsertif. Kendali konsertif merupakan “disiplin” atau paksaan yang mengatur anggota organisasi yang mempertahankan susunan dan konsistensi melalui kekuasaan (Barkes & Cheney, 1994). Kekuasaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan selalu ada dalam sistem, namun kekuasaan bukanlah dorongan dari luar. Bahkan, kekuasaan selalu diciptakan oleh berbagai bentuk interaksi dalam organisasi. Sehingga kekuasaan mendapatkan kendali, tetapi dengan tunduk pada kendali, anggota organisasi sendiri memperkuat sumber kekuasaan yang sama.

Dalam kendali konsertif, disiplin diperoleh dengan “menormalkan” perilaku, membuat cara-cara tertentu yang berjalan normal dan alami, sesuatu yang ingin dilakukan oleh anggota organisasi (Little John & A Foss, 2019). Disiplin dalam organisasi dapat memperkuat hubungan kekuasaan yang memungkinkan adanya disiplin. Dalam organisasi kontemporer, kendali disipliner dicapai dengan empat cara. *Pertama*, kendali yang melibatkan metode yang

PROPAGANDA

tidak menonjol. Dalam hal ini disiplin tidak harus jelas atau disadari tapi merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari organisasi yang berjalan terus.

Kedua, disiplin yang dihasilkan secara kolaboratif. Anggota organisasi bekerja untuk membuat kegiatan-kegiatan normal, untuk membuat standar/disiplin. *Ketiga*, disiplin merupakan bagian dari hubungan sosial. Apa yang dikatakan orang dan dilakukan kepada orang lain diatur oleh dan menghasilkan kegiatan yang ternormalkan. Aturan-aturan yang tidak diakui dalam sebuah organisasi memberitahu topik-topik apa yang dapat dan tidak dapat dibicarakan tentang tempat kerja, kapan dan di mana interaksi dapat terjadi, perilaku non verbal apa yang tepat/tidak tepat, dan siapa yang bisa mengawasi percakapan. Dengan adanya penemuan surat elektronik, semua yang tidak dapat diceritakan dalam situasi tatap muka dapat dibagi melalui surat elektronik, dan organisasi segera mengembangkan aturan informal tentang apa yang tepat dan apa yang tidak.

Cara kendali yang paling efektif didasarkan pada nilai-nilai yang mendorong anggota organisasi, hal paling dasar yang diperjuangkan. Hal ini dapat meliputi uang, waktu, pencapaian, pemahaman kerja sama tim, dan sebagainya. Menjadi anggota sebuah tim yang sangat dinikmati dalam pekerjaan bisa jadi lebih berharga daripada penghargaan tradisional seperti uang.

Menurut Tompkins dan Cheney, pengambilan keputusan organisasi mengikuti sebuah pola silogistis, di mana pelaku berpikir secara deduktif dari dasar pemikiran umum dan di mana pilihan didasarkan pada pemikiran tersebut (Simon, 1976). Kendali ditonjolkan ketika pekerja, yang menerima pemikiran umum tertentu, memikirkan kesimpulan yang diharapkan oleh manajemen. Dasar pemikiran diterima karena adanya insentif seperti gaji dan otoritas orang-orang yang memiliki kekuasaan sangat berhubungan dengan gagasan Weber tentang birokrasi. Namun, penerimaan ini tidak datang begitu saja, karena konflik sering terjadi dari perbedaan antara keyakinan pribadi pegawai dan pemikiran organisasi. Sejumlah perselisihan perindustrian yang mendasar berakar dari perbedaan-perbedaan tersebut.



Gambar 2. Pola silogistis konflik PKS

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dengan studi *literature review*. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*; melakukan analisis data secara induktif; dan menekankan makna.



Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2019). Metode ini berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2019).

Menurut Ericson dalam Susan Stainback (2003), Penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail (Sugiyono, 2017). Merriam dalam bukunya *Qualitative Research* (2009), menyatakan bahwa penelitian kualitatif tertarik untuk memahami bagaimana orang menginterpretasikan pengalaman dalam hidupnya, bagaimana mereka mengonstruksikan dunianya, dan apa makna pengalaman dalam hidupnya (Sugiyono, 2017).

Teori dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai teori lensa (*lens theory*) atau teori perspektif. Dalam hal ini Creswell (2009) menyatakan: “ *Theoretical lens or perspectives in qualitative research; provides an overall orienting lens that used to study question of gender, class, and race. This lens becomes an advocacy perspective that shapes the types of questions asked, informs how data are collected and analyzed, and provide a call for action or change*”.

Dalam penelitian kualitatif, teori yang digunakan adalah teori lensa atau teori perspektif. Teori berfungsi membantu peneliti untuk membuat berbagai pertanyaan penelitian, memandu bagaimana mengumpulkan data dan analisis data. (Sugiyono, 2017). Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Namun dalam melaksanakan penelitian kualitatif, peneliti harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrumen dan sebagai panduan untuk wawancara dan observasi. Peneliti kualitatif dituntut untuk dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat “*perspektif emic*” artinya memperoleh data “sebagaimana seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum insiden pemecatan Fahri terjadi, Ketua Majelis Syuro PKS telah melakukan pemanggilan kepada Fahri sebagai Pimpinan DPR dan Ketua Fraksi PKS, dengan memberikan arahan kepada FH yang secara substansi adalah bahwa sebagai partai kader dan partai dakwah, PKS ingin tampil sesuai karakteristik partai kader dan partai dakwah dengan kedisiplinan dan kesantunan. Untuk itu KMS meminta agar FH menyesuaikan diri dengan arah kebijakan tersebut dan senantiasa melakukan *syuro/musyawah* serta mengindahkan arahan Partai, terutama dalam menyampaikan pendapat ke publik sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan citra negatif bagi Partai. Apalagi posisi FH sebagai Wakil Ketua DPR RI akan selalu menjadi perhatian publik dan diasosiasikan oleh sebagian pihak sebagai sikap dan kebijakan PKS.

FH mencatat dan menerima nasehat dan masukan pada pertemuan tersebut dan ada kesiapan untuk melakukan adaptasi dengan arahan-arahan tersebut. Di lain pihak, Ketua Majelis Syuro, Wakil Ketua Majelis Syuro dan Presisen PKS pun gembira dengan respons FH dan optimis FH dapat menjalankan tugasnya sebagai anggota/kader PKS dalam posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI sesuai arahan, visi, dan misi Partai.

Seiring berjalannya waktu, sosialisasi dan supervisi arahan Pimpinan Partai terhadap seluruh struktur dan anggota partai termasuk yang mengemban amanah jabatan publik (bukan

PROPAGANDA

hanya terhadap FH saja) terus dilakukan dalam rangka konsolidasi. Berselang 7 (tujuh) pekan dari 1 September 2015 semenjak FH mendapat arahan langsung dari Pimpinan Partai dan yang bersangkutan telah menyatakan kesediaan melaksanakannya. Pimpinan Partai menilai bahwa pola komunikasi politik FH tetap tidak berubah. Sikap kontroversi dan kontraproduktif kembali berulang, bahkan timbul kesan adanya saling silang pendapat antara FH selaku pimpinan DPR RI dari PKS dengan pimpinan PKS lainnya.

Beberapa pendapat kontroversial dan kontraproduktif FH yang mengemuka saat itu adalah: 1). Kenaikan tunjangan gaji pimpinan dan anggota DPR RI dinilai FH masih kurang, padahal Fraksi PKS DPR RI secara resmi menolak kebijakan kenaikan tunjangan pejabat negara, termasuk pimpinan dan anggota DPR RI. 2). Terkait revisi UU KPK, FH menyebut pihak-pihak yang menolak revisi UU KPK sebagai pihak yang ingin menjadi pahlawan dan ingin menutupi kelemahannya, padahal di saat yang sama Wakil Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS telah secara tegas menolak revisi UU KPK. Silang pendapat yang terbuka antara FH dengan Pimpinan Partai ini tentunya mengundang banyak pertanyaan di publik dan juga internal kader PKS.

Pada tanggal 23 Oktober 2015 di Ruang Kerja DPTP PKS, Ketua Majelis Syuro (KMS) memanggil FH untuk menyampaikan penilaian Pimpinan Partai dan kebijakan partai selanjutnya untuk FH. KMS menyatakan bahwa sikap FH tidak sesuai dengan arahan Partai dan tidak sesuai dengan komitmen yang telah disampaikannya kepada Pimpinan Partai pada pertemuan tanggal 1 September 2015.

Untuk itu demi kemaslahatan Partai ke depan dan kebaikan FH, Pimpinan Partai memandang penugasan FH di posisi Wakil Ketua DPR RI perlu ditinjau. Walau demikian KMS tetap memandang FH sebagai anggota/kader potensial PKS yang harus mengoptimalkan perannya, sehingga FH akan ditugaskan pada posisi lain di DPR RI (salah satu pimpinan dari Alat Kelengkapan Dewan DPR RI).

Sesuai dengan UU No 17 Tahun 2014 *jo* UU No 42 Tahun 2014, proses rotasi jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI dapat dilakukan dengan cara diberhentikan oleh Partai atau FH mengundurkan diri. Atas pertimbangan kemaslahatan bersama, maka KMS meminta FH mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Atas permintaan KMS tersebut, FH menyatakan mengerti akan keputusan tersebut dan siap melaksanakannya. FH juga menyatakan akan menyiapkan sendiri alasan-alasan pengunduran dirinya dalam surat ke DPR RI. FH juga siap mensosialisasikan rencana pengunduran dirinya kepada kolega sesama pimpinan DPR RI, kepada Presidium Koalisi Merah Putih (KMP) dan kepada keluarganya.

Hanya saja FH meminta waktu untuk menuntaskan beberapa hal sehingga FH menjanjikan akan mengundurkan diri pada pertengahan 2015. KMS menyetujui permintaan FH tersebut dan disepakati bahwa pengunduran diri FH akan dilakukan pada pertengahan Desember 2015 sebelum masuk masa reses DPR RI sehingga saat masuk masa sidang berikutnya posisi FH sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Pada 1 Desember 2015, KMS memanggil FH untuk datang ke kantor DPTP PKS. KMS menanyakan perkembangan proses pengunduran diri FH dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI sebagaimana telah dijanjikan sebelumnya oleh FH sendiri. Di luar dugaan, FH menyatakan bahwa dia berpikir ulang untuk mundur, karena menurut pendapatnya apabila FH mengundurkan diri maka akan berakibat pada kocok ulang pimpinan DPR RI. Meskipun sebenarnya sebelum pertemuan tersebut KMS telah mempelajari bahwa hal tersebut tidak akan berakibat pada kocok ulang dan walaupun hal tersebut terjadi maka risiko menjadi tanggung jawab pimpinan partai.

Ada beberapa metode yang digunakan dalam penyelesaian konflik yaitu *pertama*, metode stimulasi konflik, pengurangan konflik dan penyelesaian konflik. Metode stimulasi



konflik dilakukan dengan penempatan orang luar ke dalam kelompok, penyusunan kembali organisasi, penawaran bonus dan pemilihan manajer.

Kedua, Metode pengurangan konflik dilakukan mengurangi permusuhan yang ditimbulkan oleh konflik. Metode ini mengelola tingkat konflik melalui pendinginan suasana, tetapi tidak menangani masalah yang semula menimbulkan konflik. Ada dua metode yang dilakukan yaitu : mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih bisa diterima kedua kelompok. Metode kedua, mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi ancaman/musuh yang sama.

Ketiga, metode penyelesaian konflik, yang dilakukan melalui dominasi atau penekanan, kompromi, dan pemecahan masalah integratif. Melalui dominasi, maka Kekerasan yang bersifat penekanan/otokratik, penenangan (cara yang lebih diplomatis), penghindaran, aturan mayoritas. Melalui kompromi, maka dilakukan pemisahan, perwasitan, kembali ke peraturan yang berlaku, penyuaian, pemecahan masalah integratif. Secara integratif, maka penyelesaian konflik dilakukan melalui konsensus, konfrontasi, dan penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi.

Berdasarkan teori kendali organisasi, maka PKS menggunakan metode dominasi/penekanan: kekerasan yang bersifat penekanan. Keputusan PKS untuk melakukan pemecatan terhadap FH merupakan metode dominasi atau penekanan. Pimpinan PKS melakukan penekanan terhadap Fahri Hamzah agar yang bersangkutan dapat keluar dari keanggotaan partai dan kemudian mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR.

Dalam teori kendali organisasi, terdapat bentuk kendali birokrasi, yaitu bentuk pengendalian dengan menggunakan prosedur organisasi dan aturan-aturan formal, seperti yang digambarkan Weber. Pegawai diberikan sebuah kebijakan yang harus diikuti, memo, tinjauan, laporan, tinjauan rapat dan tinjauan kinerja yang digunakan untuk menyampaikan harapan yang lain (Littlejohn&A.Foss, 2019). Keputusan PKS untuk melakukan pemecatan terhadap FH merupakan bentuk keputusan karena ada beberapa aturan yang telah dilanggar. Dalam hal ini aturan partai dalam bentuk AD/ART maupun garis-garis besar kebijakan partai. Begitu pula dengan status keanggotaan partai, meskipun Fahri Hamzah telah lama menjabat sebagai Sekjend PKS dan pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, namun tetap harus taat pada keputusan partai dan aturan partai. Teguran yang ditujukan kepada FH, seharusnya tidak diabaikan. Sudah selayaknya FH melakukan introspeksi diri dan kemudian meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan. Sebagai pejabat publik, tentunya harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statemen, sehingga apa yang diucapkannya selaras dengan kebijakan partai.

Jika dilihat dari komunikasi organisasi, maka perlu ada evaluasi terhadap PKS mengenai komunikasi organisasi antara Pimpinan dan anggota PKS. Dalam persepsi Redding and Sanborn (Muhammad, 2015) mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi *downward* atau komunikasi *upward* atau komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi horizontal atau komunikasi dari orang-orang yang sama level/tingkatnya dalam organisasi, keterampilan berkomunikasi dan berbicara, mendengarkan, menulis dan komunikasi evaluasi program(Muhammad 2015). Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan evaluasi terhadap komunikasi antara pimpinan PKS dengan anggotanya, anggota dengan anggota dan bahkan kader dengan masyarakat umum. Jika PKS ingin mempertahankan suaranya pada Pemilu mendatang, maka evaluasi komunikasi ini perlu mendapat perhatian. Pimpinan PKS perlu membiasakan diri untuk mendengarkan aspirasi dari bawah sehingga program-program partai dapat selaras dengan aspirasi anggota/kader dan simpatisan. Cara berkomunikasi dengan gaya otoriter berupa instruksi/perintah yang kaku perlu diperbaiki.

PROPAGANDA

PKS perlu terus senantiasa melakukan perbaikan komunikasi dengan melakukan koordinasi atau dalam bentuk lain, mengenai kebijakan-kebijakan partai dalam menanggapi isu-isu terkini, sehingga sikap dan *statement* yang keluar dari pejabat partai adalah sama dan selaras dengan garis kebijakan partai.

Katz dan Kahn mengatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan arus informasi, pertukaran informasi dan pemindahan arti di dalam suatu organisasi (Muhammad, 2015). Organisasi adalah sebagai suatu sistem terbuka yang menerima energi dari lingkungannya dan mengubah energi ini menjadi produk atau servis dari sistem dan mengeluarkan produk atau servis ini kepada lingkungan (Muhammad, 2015). PKS merupakan partai yang dalam jargonnya akan terus melayani publik. Sebagai sebuah partai yang memiliki prinsip pelayanan kepada masyarakat, maka PKS perlu lebih membuka diri terhadap masyarakat, dan memberikan program-program kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan berfokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka konflik internal seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak berlarut-larut.

Zelko dan Dance mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal (Muhammad, 2015). Komunikasi internal adalah komunikasi dalam organisasi itu sendiri seperti komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi sesama karyawan yang sama tingkatannya. Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan organisasi terhadap lingkungan luarnya, seperti komunikasi dengan masyarakat umum. Kemudian Lesikar (Muhammad, 2015) menambahkan satu dimensi lagi dari komunikasi organisasi yaitu dimensi pribadi komunikasi pribadi di antara sesama anggota organisasi yang berupa pertukaran secara informal mengenai informasi dan perasaan di antara sesama anggota organisasi.

Terkait komunikasi internal, maka bentuk komunikasi yang baik adalah bukan sekedar bertemu dalam forum pekanan, namun mengetahui apa keinginan masing-masing anggotanya. Artinya, tidak ada sumbatan-sumbatan dalam komunikasi interpersonal organisasi. Permasalahan internal dapat diselesaikan dengan baik, baik permasalahan kecil maupun permasalahan besar. Jika permasalahan antara dua belah pihak tidak dapat diselesaikan, maka BPDO menjadi tempat yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan internal kader PKS. Masing-masing pihak harus memiliki cara pandang yang baik untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan terkait komunikasi eksternal, maka PKS perlu melakukan pencitraan yang baik kepada masyarakat luas. Berbagai cara perlu dilakukan baik melalui program partai maupun melalui media sosial. Kebaikan-kebaikan atau karya yang dilakukan anggota DPR RI Fraksi PKS perlu terus disosialisasikan baik melalui *website* PKS maupun media sosial yang dimiliki anggota PKS dan kader PKS.

PENUTUP

Permasalahan antara FH dan Pimpinan PKS merupakan konflik politik yang meskipun di meja hijau telah selesai, namun sebenarnya permasalahan ini belum selesai. Konflik ini memberikan pelajaran berharga bagi PKS, agar memperbaiki komunikasi politik antara Pimpinan dan anggota PKS.

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia sehingga dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks kepartaian. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka suatu organisasi atau partai politik dapat berjalan dengan lancar. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada komunikasi, maka organisasi dapat macet atau berantakan. Komunikasi efektif merupakan hal penting bagi



suatu organisasi/partai politik. Oleh karena itu, para pimpinan organisasi dan para komunikator dalam organisasi perlu memahami dan menyempurnakan kemampuan komunikasi mereka (Koehler, 1981).

Merujuk pada hal ini, maka Pimpinan PKS perlu menyempurnakan pola komunikasinya sehingga apa yang menjadi arahan atau keputusannya dapat ditaati oleh seluruh anggota partai. Pimpinan PKS merupakan pihak yang harus dihormati, sehingga hal ini menjadi evaluasi bagi Pimpinan PKS pada periode tersebut untuk memperbaiki kepemimpinannya.

Menurut Hovland, Janis dan Kelly, seperti yang dikemukakan oleh Forsdale (1981) adalah ahli sosiologi Amerika, mengatakan bahwa “*communication is the process by which and individual transmits stimuli (usually verbal) to modify the behavior of other individuals*”. Dengan kata lain, komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Pada definisi ini mereka menganggap komunikasi sebagai suatu proses, bukan sebagai suatu hal. PKS juga perlu memperbaiki AD/ART-nya sehingga tidak ada celah bagi anggotanya untuk melakukan gugatan ke pengadilan dan tidak ada celah untuk “tidak taat” pada aturan partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmar, Z. (2019). Studi Kasus Konflik Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS. *Jurnal Ilmu Politik, Volume 10*. No 1.
- Arni, M. (2015). *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Barkes, J. R. dan Cheney, G. (1994). The Concept and the Practices of Disipline in Contemporary Organizational Life. *Communication Monographs*, 61. 19-43
- Fatikasari, P. (2018). Komunikasi Internal Dalam Komunitas Generasi Baru Indonesia (GENBI) Kalimantan Barat. Analisis Kendali Organisasi Terhadap Hambatan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program Organisasi. *Vol 1*. No 1.
- Herdiansah, A. G. (2017). Pragmatisme Partai Islam di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial. Departemen of Sociology. Faculty of Social and Political Science. Universitas Padjadjaran. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi 1(2)*:152-167
- Iqbal, M. dan Nasution, A. H. (2010). *Pemikiran Politik Partai Islam: dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, 3 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- John, S. W. L. and Foss, K. A. (2019). *Teori Komunikasi. Edisi 9*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Khoiri. (Februari 2013). Partai Keadilan Sejahtera, menunggu Macam Bangun dari Tidur. *Kompas*.
- Koehler, Jerry W. Anatol, Karl W.E. dan Applbaum, Ronald L. (1981). *Organizational Communication: Behavioral Perspective*. New York: Holt Rinehart and Winstons.
- Paturahman, F. (2016). *Mekanisme Resolusi Konflik Partai Politik: Studi Kasus Langkah-langkah Partai Keadilan Sejahtera Meredam Konflik Internal Pasca Musyawarah Kerja Nasional di Bali Tahun 2008*. Universitas Indonesia.
- Safurudin, M. (2000). Keefektifan Kendali Organisasi: Perspektif Teori Agensi. *Jurnal Bisnis Strategi, Vol 5*. Tahun III.
- Setiawan, B. dan Nainggolan, B. (2004). *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Kompas Gramedia Group
- Simon, H. A. (1976). *Administrative behavior*. New York: Free Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

PROPAGANDA

Tomkins and Cheney. "Communication and Unobtrusive Control". 184

Tomkins dan Cheney. (1981). "The Social Relations of production at the Point of Production",

Yuliani, P. D., Sugandi, dan Hairunnisa. (2018). Peran Komunikasi Organisasi terhadap Kompensasi dan Motivasi. *ejurnal Ilmu Komunikasi*.6 (4).

Yumitro, G. (2013) Partai Islam Dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 17. No 1. 35-50

